

## Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat

<sup>1</sup>Andi Ridha Yayank Wijayanti\*, <sup>1</sup>Kaimuddin, <sup>1</sup>Muhammad Arafat Abdullah, <sup>1</sup>Nurlaela, Astina, <sup>1</sup>Andi Arafat, <sup>1</sup>Firmasyah Bin Abd Jabbar, <sup>2</sup>Nurfaizi

<sup>1</sup> Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Indonesia

Email\*: [andi.yayank@unsulbar.ac.id](mailto:andi.yayank@unsulbar.ac.id)

### Article Info

Submitted: 27 Maret 2024

Revised: 16 Juni 2024

Accepted: 10 Juli 2024

Published: 20 Juli 2024

**Keywords:** Pemberdayaan masyarakat, kerusakan lingkungan, kelestarian lingkungan.

### Abstract

*Community empowerment begins with understanding that every individual and group has potential and abilities that can be developed. In Mamuju Regency, precisely in Tommo District, there is peat but it is small which if damaged and not managed properly will result in land fires, floods, and soil pollution. This assistance aims to position the community as a party that plays an active role in environmental recovery. One of the initial stages of assistance or empowerment activities carried out is Problem Identification and Situation Analysis. It is hoped that the problems faced can be clearly identified, the related situation can be analyzed comprehensively, and the next steps can be designed to plan effective and sustainable interventions. Strengthening the understanding of problem identification and location analysis is carried out using the IMAS tool through survey methods, interviews, and FGDs. The results of problem identification and situation analysis found several problems that can be used as references in formulating systematic and effective planning for community empowerment. Based on the results of the problem identification and situation analysis in Buana Sakti Village, Tamemongga Village, Tamejarra Village, West Leling Village and North Leling Village, problems were found in flooding, lack of fertilizer availability and the distance of the village from the city which makes it difficult to get fresh fish to meet the protein needs of the community. From the results of the problem identification and situation analysis, a Community Work Plan formulation was formed such as freshwater fish farming, long-term crop planting, horticultural planting, and livestock farming. The proposed work plan is expected to be able to help the community in meeting needs, improving the community's economy, and can answer problems that occur in each village.*

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan memahami bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Pada Kabupaten Mamuju Tepatnya di Kecamatan Tommo memiliki gambut namun kecil yang apabila rusak dan tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada kebakaran lahan, banjir, dan pencemaran tanah. Pendampingan ini bertujuan untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berperan aktif dalam pemulihan lingkungan. Salah satu tahapan awal dari pendampingan atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi. Harapannya bahwa masalah-masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi dengan jelas, situasi terkait dapat dianalisis secara komprehensif, dan langkah-langkah selanjutnya dapat dirancang untuk merencanakan intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Penguatan pemahaman identifikasi masalah dan analisis situasi dilakukan dengan alat IMAS melalui metode survey, wawancara, dan FGD. Hasil dari

identifikasi masalah dan analisis situasi ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan perencanaan yang sistematis dan efektif pada pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi pada Desa Buana Sakti, Desa Tamemongga, Desa Tamejarra, Desa Leling Barat dan Desa Leling Utara ditemukan masalah banjir, kurangnya ketersediaan pupuk dan jarak desa dari kota yang jauh sehingga sulitnya mendapatkan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Dari hasil identifikasi masalah dan analisis situasi terbentuklah rumusan Rencana Kerja Masyarakat seperti budidaya ikan air tawar, penanaman tanaman jangka panjang, penanaman hortikultura, dan usaha ternak. Rencana kerja yang diusulkan harapannya dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan dapat menjawab masalah yang terjadi di desa masing-masing.

## 1. PENDAHULUAN

Alam dan lingkungan merupakan sumber daya utama bagi kehidupan, salah satunya berwujud sebagai mata pencaharian penduduk lokal untuk bertahan hidup (Wijayanto et al., 2017). Faktor penting yang harus diperhatikan sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa adalah kelestarian lingkungan Pemanfaatan secara bijak dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam seperti hutan, sungai, pertanian dan lain-lain tidak hanya memastikan kelangsungan hidup masyarakat desa, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Idrus et al., 2021). Menjaga ketersediaan sumberdaya alam, melindungi lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dapat memastikan kelangsungan ekonomi masyarakat serta mewariskan sumberdaya alam berkelanjutan untuk generasi yang akan datang (Utami & Novikarumsari, 2022).

Salah satu strategi penting dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijak dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan, kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk dapat mewujudkan dan menentukan masa depannya sendiri (Endah et al., 2020). Melalui pemberdayaan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pemberdayaan merupakan salah satu cara agar masyarakat desa dapat mencapai kemandirian yang didukung dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran pemanfaatan sumberdaya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang tepat guna (Aryanisila, 2023).

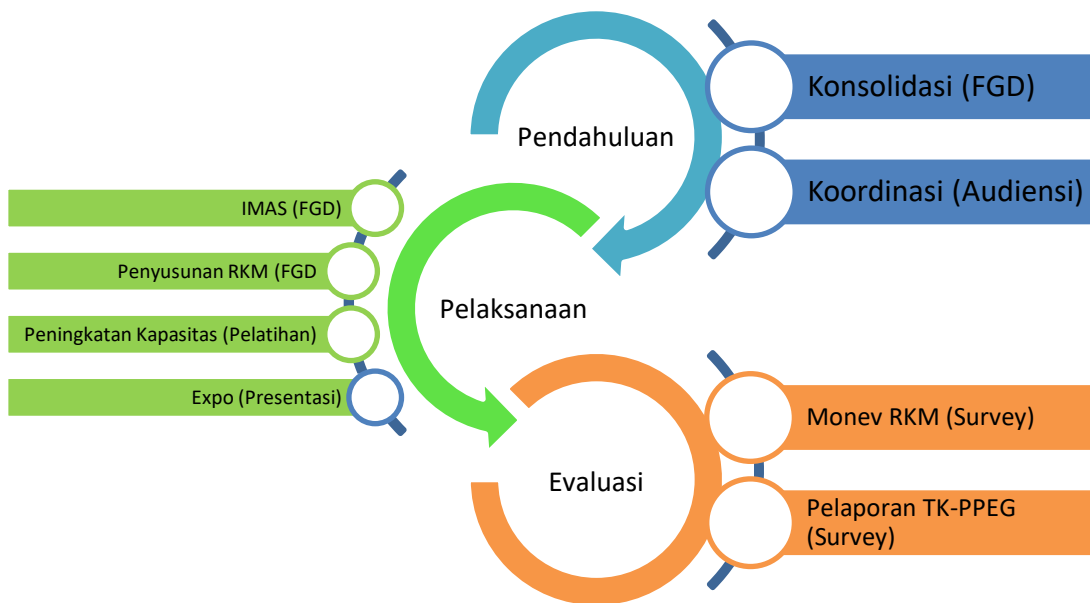
Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan memahami bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Kenyataannya, seringkali masyarakat kurang berdaya karena tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pelatihan, modal dan peningkatan kapasitas lainnya. Keterbatasan yang ada dalam pemanfaatan sumberdaya pada akhirnya akan sulit mencapai kemandirian ekonomi. Masyarakat yang berdaya akan mengalami perubahan sosial guna memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Azis, 2022). Studi pemberdayaan telah banyak mengemukakan elemen pemberdayaan yang perlu untuk disikapi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keberlanjutan ekonomi yaitu kemandirian intelektual, kemandirian fisik dan material dan kemandirian manajerial. Pembentukan pribadi yang inovatif dalam mengantar pada kemandirian masyarakat membutuhkan kemandirian intelektual sebagai pembentuk dasar pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dikemukakan oleh (Malik et al., 2021). Selain itu dalam pemberdayaan, kemampuan individu maupun masyarakat berupa kemampuan produktif disertai dengan kemampuan berfikir dan bertindak perlu ditopang oleh kemandirian fisik dan material (Amelia et al., 2022). Sedangkan Kemampuan manajerial merupakan kemampuan membina diri dan meningkatkan kapasitas dalam proses pengelolaan kegiatan kolektif (Hairunisya et al., 2020). Pada sisi lain ini hadirnya pemberdayaan memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan, pemerintah, organisasi, atau lembaga lokal. Dukungan multi pihak sangat mempengaruhi implementasi suatu program pemberdayaan, membangun kolaborasi dari peran multipihak dalam proses pendampingan berbasis fasilitasi dan pemberdayaan merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan program (Jamasy et al., 2023).

Menyikapi pentingnya peran multipihak dalam membangun pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa, sejak tahun 2022 sampai saat ini Fakultas Pertanian Universitas Sulawesi Barat bekerjasama dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendampingan program kemandirian masyarakat dalam pemulihan kerusakan lingkungan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang mencakup Desa Buana Sakti, Desa Tamemongga, Desa Tamejarra, Desa Leling Utara dan Desa Leling Barat pada tahun 2023. Sasaran dari pendampingan ini yaitu organisasi kelompok masyarakat dengan tujuan terciptanya perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salah satu tahapan awal dari pendampingan atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi. Harapannya bahwa masalah-masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi dengan jelas, situasi terkait dapat dianalisis secara komprehensif, dan langkah-langkah selanjutnya dapat dirancang untuk merencanakan intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Menemukan dan menggali persoalan merupakan langkah penting yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan. Mencari dan mengidentifikasi persoalan akan memberikan gambaran tentang apa yang dihadapi masyarakat dan merumuskan strategi yang tepat untuk memberdayakan mereka (Indrizal, 2014). Melalui Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) di Desa Buana Sakti, Desa Tamemongga, Desa Tamejarra, Desa Leling Utara dan Desa Leling Barat pada tahun 2023. Pada pelaksanaan pendampingan program kemandirian masyarakat dalam pemulihan kerusakan lingkungan diharapkan membuka persoalan dan harapan masyarakat merupakan langkah yang penting dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan.

**2. METODE**

Kegiatan ini secara umum dilakukan dengan pendekatan partisipatif, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan (Putera, 2007; Diagram alir metode pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat

Penguatan pemahaman dalam identifikasi masalah dan analisis situasi dilakukan dengan tahapan berikut:

Tabel 1. Metode pendekatan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

No.	Alat Imas	Metode	Tujuan
1.	Konsolidasi dan Sosialisasi Program dengan aparat desa dan masyarakat	Audiensi/ wawancara	Perkenalan, sosialisasi rencana kerja, memperoleh gambaran umum tentang masyarakat
2.	Inventarisasi Data Komunitas	FGD	Penelusuran sejarah desa, Jumlah penduduk, luas wilayah, luas lahan, mata pencaharian
3.	Pembentukan Kelompok	FGD	Ikatan sosial, penataan kelembagaan, membantu IMAS, Membantu menyusun dokumen IMAS
4.	Pemetaan Sosial	FGD	Perencanaan program, lokasi program, konsentrasi cakupan program
5.	Pembuatan Diagram Venn	FGD	Pemetaan koordinasi antar lembaga dan mitra kerja
6.	Transect Walk	Survey dan wawancara	Mengenali wilayah program, penguatan objektifitas masalah dan situasi di lokasi
7.	Rapid Technical Assessment	Survey	Mengenali detail profil lahan (masalah, potensi dan solusi)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Menguak Persoalan; Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

##### 1) Konsolidasi dan Sosialisasi Program

Pendekatan identifikasi masalah dan analisis situasi pada lokasi pendampingan Desa Buana Sakti, Desa Tamejarra, Desa Tamemongga, Desa Leling Utara dan Desa Leling Barat menggunakan tujuh alat IMAS. Masing-masing fasilitator masyarakat membantu kelompok TK-PPEG (Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) dalam menganalisis situasi yang terjadi di desa mereka masing-masing. Pada dasarnya semua model perencanaan partisipatif merupakan alat atau pendekatan untuk melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS). Kumpulan hasil IMAS merupakan input dalam rangka menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM).



Gambar 2. Konsolidasi dan sosialisasi Program dengan Aparat Desa

Konsolidasi dan sosialisasi program merupakan salah satu proses awal dalam perencanaan implementasi pendampingan program. Tujuannya untuk memperkenalkan, mendukung, dan membangun kesadaran serta menciptakan sinergi antara stakeholder yang terlibat dan memastikan bahwa program pendampingan kedepannya dapat berjalan efisien dan efektif. Masing-masing fasilitator lapangan yang tersebar pada lima desa pendampingan telah melakukan konsolidasi dan sosialisasi program. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membangun dukungan dan partisipasi yang diperlukan untuk kesuksesan dan keberlanjutan program kedepannya.

##### 2) Inventarisasi Data Komunitas

Inventarisasi data komunitas dan pembentukan kelompok merupakan komponen penting dalam pendampingan masyarakat. Adanya kelompok yang terbentuk sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan efektivitas program pendampingan. Terbentuknya kelompok diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Pada program pendampingan ini terbentuk 5 kelompok dari lima desa yaitu TK-PPEG Mitra Tani (Desa Buana Sakti), TK-PPEG Harapan Bersama (Desa Tememongga), TK-PPEG Binter (Desa Tamejarra), TK-PPEG Anugrah Tani (Leling Utara), dan TK-PPEG Sipatuo (Leling Barat).



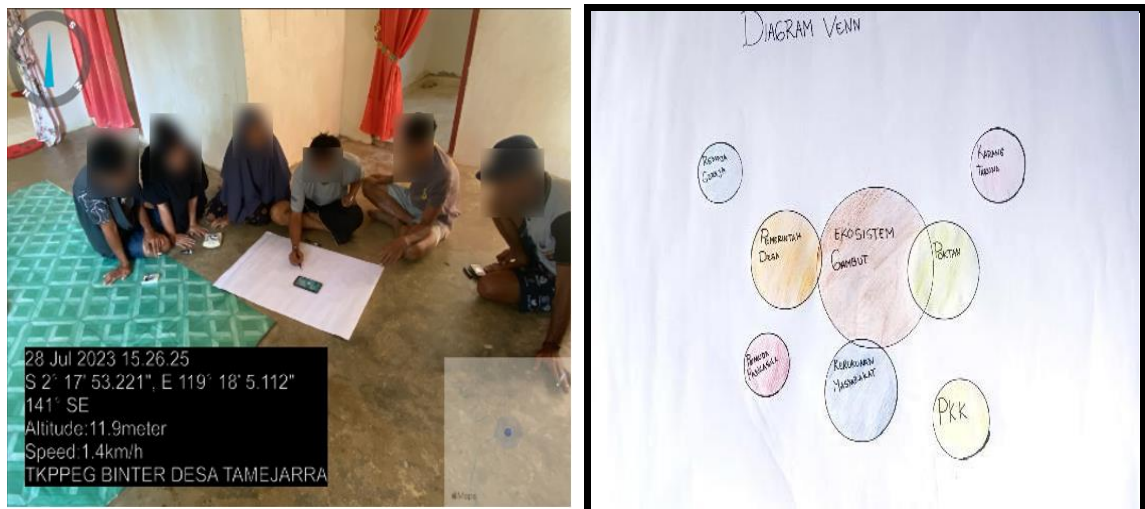
Gambar 3. Inventarisasi Data Komunitas dan Pembentukan Kelompok

### 3) Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok dimuat dalam SK Kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa. Susunan struktur organisasi terdiri ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota (bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). Pada struktur organisasi kelompok, anggota kelompok tidak hanya terdiri dari laki-laki namun juga ada perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam kelompok untuk menciptakan keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

### 4) Pemetaan Sosial dan Pemuatan Diagram Venn

Pembuatan peta sosial dan diagram venn merupakan alat yang penting dalam menganalisis dan memvisualisasikan hubungan sosial, struktur kelompok, hubungan antar elemen. Menggambar peta sosial dan diagram venn diharapkan dapat membantu kelompok dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk membangun keterlibatan dan partisipasi aktif. Masing-masing kelompok memiliki gambaran tersendiri terkait peta sosial dan diagram venn.



Gambar 4. Pembuatan Peta Sosial dan Diagram Venn

### 5) Transect Walk dan Rapid Technical Aseessment

Transect walk dan Rapid Technical Aseessment adalah alat dan strategi untuk mengenal lebih dekat terkait lokasi rencana program tempat masyarakat akan merealisasikan rencana kerja mereka yang telah digambarkan pada peta sosial. Pada saat transect walk fasilitator pendamping bersama TK-PPEG melakukan penelusuran dengan berjalan tujuannya untuk memeriksa ulang informasi yang ada pada peta serta memahami karakteristik dan keadaan dari tempat-tempat tertentu



Gambar 5. Transect Walk dan Rapid Technical Assessment

Setelah dilakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi melalui serangkaian pertemuan dengan aparat desa, inventarisasi data komunitas, pembentukan kelompok, pembentukan peta sosial, *Rapid Technical Assessment* (RTA), dan *Transect walk*. Selanjutnya ditindaklanjuti pada kegiatan FGD IMAS Kegiatan FGD ini

bertujuan untuk melibakan masyarakat yang diawali dengan pengenalan masalah dan perencanaan kegiatan. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui masalah-masalah yang ada dan dihadapi di lingkungan (Desa) masing-masing dan pada akhirnya mampu untuk bertindak menyelesaikannya permasalahan tersebut. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti persyaratan dan tahapan-tahapan kegiatan program menjadi begitu penting. Keterlibatan yang diharapkan bukan hanya pada sisi kehadiran namun juga lebih pada bagaimana masyarakat mampu untuk berperan, lebih terbuka untuk mengemukakan dan merumuskan solusi apa yang dapat diambil terhadap permasalahan yang ada. Kegiatan FGD IMAS selain dihadiri oleh Fasilitator Masyarakat, TK-PPEG Mitra Tani, TK-PPEG Harapan Bersama, TK-PPEG Binter, TK-PPEG Anugrah Tani, TK-PPEG Sipatuo, juga dihadiri Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar, Kapokja DMPG KLHK, pemerintah kecamatan, pemerintah Desa. Kehadiran akademisi, pemerintah Kecamatan dan Desa tentunya diharapkan sebagai pendorong dan bagian dari penguatan peran dan komitmen bersama berbagai pihak terhadap program sekaligus dapat memberikan masukan dan arahan kegiatan kedepannya. Keterlibatan berbagai pihak pada akhirnya akan menguatkan program dalam pelaksanaannya.



Gambar 6. FGD Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

Pada rembuk FGD IMAS masing-masing TK-PPEG mempresentasikan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi yang telah dilakukan bersama fasilitator masyarakat. Hasil dari IMAS ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Dari pemaparan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi yang ada dan sebenarnya terjadi di masyarakat, nantinya ditemukan rumusan tindakan dan kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan. Sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama membangun keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan ini. Pelibatan masyarakat dalam bentuk menyumbangkan ide/ pikirannya pada tahap pelaksanaan perencanaan kegiatan merupakan jalan mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungannya (Adenansi et al, 2015).



Gambar 7. Presentasi Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Oleh Ketua TK-PPEG

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan perencanaan yang sistematis dan efektif pada pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa hasil identifikasi masalah yang ditemukan dan diungkapkan oleh TK-PPEG saat pelaksanaan FGD IMAS sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

No	Desa	TK-PPEG	Hasil Analisis Masalah dan Situasi
1	Buana Sakti	Mitra Tani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Banjir</li> <li>2) Hama tikus menyerang pertanian warga</li> <li>3) Kurangnya ketersediaan pupuk</li> <li>4) Membutuhkan peningkatan kapasitas terkait budidaya ikan air tawar</li> </ol>
2	Tamemongga	Harapan Bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rentan terjadi banjir saat musim penghujan</li> <li>2) Kekeringan saat musim kemarau</li> <li>3) Jarak Desa dari kota sehingga untuk memenuhi kebutuhan protein atau konsumsi ikan sulit.</li> <li>4) Budidaya ikan air tawar yang dilakukan masyarakat memiliki kendala terkait kurangnya pengetahuan dan teknologi pembantu sehingga terkadang berpengaruh terhadap hasil.</li> </ol>
3	Tamejarra	Binter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sering terjadi banjir saat musim hujan</li> <li>2) Pada pengelolaan budidaya pertanian tanaman kurang tumbuh dengan baik karena ketersediaan pupuk yang kurang</li> <li>3) Kurangnya pengetahuan pengelolaan budidaya ikan air tawar sehingga hasil yang diperoleh sangat minim.</li> </ol>
4	Leling Barat	Sipatuo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi.</li> <li>2) Pasokan pupuk kurang menghambat optimalisasi usaha pertanian tanaman tidak tumbuh dan berkembang.</li> <li>3) Pada pengelolaan budidaya air tawar belum mendapatkan potensi hasil yang optimal</li> </ol>
5	Leling Utara	Anugrah Tani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beberapa jenis komoditi pertanian telah dibudidayakan namun belum dikelola secara maksimal</li> <li>2) Rawan terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan</li> <li>3) Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan namun akses desa yang jauh dari kota</li> </ol>

Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama yang mewarnai lima lokasi pendampingan. Pada satu sisi dipahami bersama bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia bersumber dari sektor pertanian (Simandjuntak & Mantiri, 2022). Pada sisi lain ketersediaan lahan yang masih begitu besar di lima lokasi merupakan salah satu faktor utama yang dilihat masyarakat untuk dapat dimanfaatkan (bertani) dan tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulainya. Melalui pertanian masyarakat dapat memproduksi berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber kehidupan mereka seperti sayuran, buah-buahan, kolam ikan buatan, dan komoditas lainnya, lahan kosong digunakan untuk bercocok tanam dan beternak. Hasil pertanian ini selain dikonsumsi sendiri tidak jarang untuk dijual pada akhirnya mata pencaharian pada sektor pertanian memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syukri & Mahmut, 2019).

Pilihan bertani dari masing-masing kelima desa pendampingan di Kecamatan Tommo diketahui pula sangat dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, paparan TK PPEG dominan mengemukakan bahwa saat musim penghujan dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu penyebab utama banjir di Desa Buana Sakti, Tamemongga, Tamejarra, Leling Utara, dan Leling Barat. Banjir telah menyebabkan rusaknya sebagian besar lahan pertanian dan menghambat pertumbuhan tanaman. Keadaan ini hampir setiap tahun terjadi. Kekeringan yang panjang juga tidak luput terjadi. Perubahan iklim yang terjadi sangat mempengaruhi kondisi pertanian masyarakat.

Selain itu paparan TK PPEG juga terkait masalah pasokan pupuk yang kurang memadai berdampak pada optimalisasi usaha pertanian. Tanaman yang kekurangan nutrisi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, hal ini akan mengakibatkan kerugian dalam produksi pertanian. Optimalisasi pasokan pupuk terkendala pada jarak desa ke kecamatan yang begitu jauh dengan kondisi akses jalan yang kurang baik merupakan salah satu kendala masyarakat. Kenyataan ini pula yang berimplikasi pada sulitnya masyarakat mendapatkan ikan segar. Pilihan mengusahakan budidaya ikan tawar oleh masyarakat dianggap lebih baik namun diketahui bahwa dalam hal produktivitasnya kurang maksimal.

**b. Aksi Bersama; catatan harapan dan tantangan program**

Paparan TK PPEG dari tiap lokasi pada akhirnya dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Masyarakat sebagaimana disajikan pada table 3.

Tabel 3. Usulan Rencana Kerja Masyarakat

No	Desa	TK-PPEG	Rumusan Rencana Kerja Masyarakat
1	Buana Sakti	Mitra Tani	1) Budidaya Ikan Air Tawar 2) Penanaman Hortikultura 3) Penanaman Tanaman Jangka Panjang (Jeruk, Apukat, dan Durian)
2	Tamemongga	Harapan Bersama	1) Budidaya Ikan Air Tawar 2) Penanaman Hortikultura 3) Penanaman Alpukat Mentega
3	Tamejarra	Binter	1) Budidaya Ikan Air Tawar 2) Budidaya Pepaya California 3) Usaha Ternak Kambing
4	Leling Barat	Sipatuo	1) Budidaya Ikan Air Tawar 2) Penanaman Hortikultura 3) Penanaman Tanaman Jangka Panjang (Apukat, dan Durian) 4) Ternak Ayam Kampung
5	Leling Utara	Anugrah Tani	1) Budidaya Ikan Air Tawar 2) Penanaman Kacang Tanah dan Lombok 3) Penanaman Alpukat

Memperhatikan rumusan rencana kerja yang dihasilkan oleh masing-masing TK-PPEG pada setiap desa terlihat bahwa masyarakat melihat program ini sebagai jalan untuk memajukan produktifitas pertanian mereka dan pemenuhan kebutuhan akan sumber penghidupan mereka. Selain karena ketersediaan lahan yang memang masih begitu besar, juga sangat ditunjang pada potensi sumberdaya manusia yang dimiliki (keterampilan dan pengetahuan) yang dimiliki. Meskipun diketahui pula bahwa kapasitas SDM yang dimiliki masih perlu untuk ditingkatkan. Pilihan-pilihan rencana kerja yang ada sangat penting untuk disikapi bukan hanya pada rentang waktu program yang ada saja. Keberlanjutan menuju kemandirian desa harus mampu untuk tetap dijaga dengan adanya sinergi dengan beberapa pihak.

Program pemberdayaan masyarakat selalu membutuhkan tindakan kolektif untuk dapat mencapai berdayanya masyarakat itu sendiri. Lahirnya tindakan kolektif seharusnya tidak hanya dilihat pada adanya tujuan bersama, lebih jauh tindakan kolektif lahir dari berbagai sumber. Pengetahuan dan informasi yang tidak memadai, konflik kepentingan dari tiap elemen merupakan hal yang sepatutnya dapat dilihat. Masyarakat dengan keadaan keterbatasan pengetahuan dan kekurangan informasi akan berdampak pada sulitnya jalinan koordinasi. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam kerja sama menuju kemandirian yang diharapkan.

Menyadari keadaan tersebut diatas menjadikan program ini perlu mengedepankan saluran pengetahuan dan informasi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam semangat inklusifitas menjadi syarat utama yang harus terjadi. Peran serta institusi pendidikan dan pemerintah dalam melihat hal ini sangat dibutuhkan. Evaluasi dampak berkelanjutan perlu dilakukan agar program pemberdayaan tidak hanya dilaksanakan pada waktu tertentu (Sururi et al., 2022). Kontinuitas menuju masyarakat berdaya (mandiri) harus ditunjang dengan sinergi berbagai pihak. Peran stakeholder sangat penting dalam pemberdayaan, adanya sinergi berbagai pihak pemberdayaan masyarakat dapat terwujud (Utami & Novikarumsari, 2022).

Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat sebagai pendamping berperan sangat penting dalam program pendampingan ini. Melalui pengabdian masyarakat merupakan bentuk bukti nyata komitmen untuk berkontribusi secara positif terhadap sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokasi program akan dilakukan. Pada proses pendampingan melalui pertemuan dan FGD yang dilakukan Fapertahut berusaha untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan inovasi yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi. Adanya peningkatan pengetahuan melalui pemberian materi dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat (Prihtanti et al., 2024). Salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan yaitu mendatangkan narasumber Dosen Fakultas Perikanan dan Peternakan Unsulbar untuk memberikan materi terkait budidaya ikan air tawar pada saat FGD Rencana Kerja Masyarakat.





Gambar 8. Pemberian Materi Budidaya Ikan Air Tawar

Pelatihan terkait budidaya ikan air tawar saat FGD Rencana Kerja Masyarakat merupakan hasil identifikasi masalah dan analisis situasi serta permintaan TK-PPEG. Pada lokasi pendampingan ada beberapa masyarakat yang pernah melakukan budidaya air tawar namun terkadang bibit ikan kurang berkembang. Melalui materi pelatihan budidaya air tawar diharapkan masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seperti teknik budidaya, pemilihan lokasi yang tepat, manajemen air, dan pemberian pakan. Pelatihan ini juga mengajarkan prinsip keberlanjutan dalam budidaya ikan, seperti penggunaan sumber daya secara bijak dan praktek ramah lingkungan.

Sesuai dengan rangkaian kegiatan pendampingan program dimana telah ditentukan bahwa akan dilaksanakan Ekspose Rencana Rencana Kerja yang merupakan salah satu proses penting dalam memetakan langkah-langkah untuk merumuskan harapan dan menghadapi tantangan bersama dengan para stakeholder. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Waterpark Maleo. Tujuan dilaksanakan ekspose dilakukan yaitu:

1. Mensosialisasikan rencana kegiatan kemandirian masyarakat dalam pemulihan kerusakan lingkungan.
2. Menemukan sinergitas antara rencana kerja masyarakat dengan program atau kebijakan pemerintah daerah.
3. Lahirnya pemahaman bersama untuk tindak lanjut program.

Adapun beberapa tamu/stakeholder undangan yang sempat hadir pada ekspose rencana kerja masyarakat yaitu dari Direktorat Pengendali Kerusakan Gambut (hadir online), Bupati Kabupaten Mamuju diwakili Asisten III, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kehutanan Provinsil Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura dan Peternakan Mamuju, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Sekcam Kecamatan Tommo, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tommo, Kepala Desa Buana Sakti, Kepala Desa Tamemongga, Kepala Desa Tamejarra, Kepala Desa Leling Utara, Kepala Desa Leling Barat.



Gambar 9. Pemaparan Rencana Kerja Masyarakat oleh Ketua TK-PPEG

Melalui proses ekspose ini, masing-masing TK-PPEG yang diwakili oleh ketua kelompok memiliki kesempatan untuk presentasi rencana kerja yang akan mereka lakukan. Mereka juga dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada para stakeholder sehingga terciptanya ruang diskusi terbuka mengenai potensi, tantangan dan hambatan yang mungkin nantinya akan dihadapi selama pelaksanaan realisasi rencana kerja.



Gambar 10. Diskusi Panel oleh Dinas Terkait Sebagai Penanggung RKM

Terlaksananya ekspose ini kedepannya diharapkan pihak stakeholder dan dinas terkait akan mengambil peran aktif untuk mendukung kegiatan baik dari segi kebijakan maupun sumber daya. Hal ini guna memastikan bahwa rencana dan kegiatan masyarakat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Adanya sinergi yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, diharapkan rencana kegiatan masyarakat terwujud dengan baik dan berkelanjutan.

### c. Keberdayaan masyarakat

Lahirnya keberdayaan masyarakat pada dasarnya membutuhkan stimulan yang berkelanjutan guna mencapai kemandirian. Dari rangkaian kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, untuk mengukur keberdayaan masyarakat desa target, kami melakukan penilaian hasil kegiatan melalui survey lapangan dan laporan fasilitator masyarakat yang terjadwal sejak awal program sampai akhir. Kuisoner penilaian digunakan untuk menangkap tingkat keberhasilan program dan keberdayaan masyarakat. Berikut beberapa hal yang menjadi tolak ukur penilaian awal keberhasilan dan keberdayaan masyarakat desa target sebagai berikut :

#### 1. Penguatan modal sosial masyarakat untuk aksi bersama

Selama ini sebelum adanya kegiatan program yang dilakukan, diketahui sebagian masyarakat desa target dalam pengelolaan lahannya masih memilih untuk bekerja sendiri dengan hanya melibatkan anggota keluarga saja. Rasa kebersamaan yang diarahkan untuk produktifitas lahan diluar keluarga sangat minim diterapkan. Namun setelah adanya pembentukan kelompok masyarakat kini dalam aktifitas pengelolaan lahan telah melibatkan anggota kelompok yang diatur dan disepakati secara bergiliran. Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pada akhirnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu melalui kelompok ini pula telah membuka jaringan kerjasama bukan hanya sesama anggota dan antar kelompok tani, namun juga menjembatani hubungan dengan pihak dinas terkait dan institusi pendidikan. Beberapa rencana program telah digagas bersama oleh dinas terkait dan masyarakat kedepannya

#### 2. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lahan dan kolam ikan

Pemberian pelatihan selama masa program juga telah berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat. Pemilihan komoditi yang sesuai dengan kondisi lahan/kolam ikan serta berbagai masukan informasi dan pengetahuan telah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan (proses pertimbangan) dalam pengelolaan lahan dan kolam ikan dengan demikian resiko kegagalan dan penyiapan rencana telah disusun sedemikian rupa berdasar atas pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan.

#### 3. Keterlibatan Perempuan

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan Program ini juga paling tidak telah berhasil melibatkan peran serta perempuan dalam masing masing kelompok masyarakat yang dibentuk. Perempuan lebih terlihat pada fisiknya yang kemudian berpengaruh pada kedudukannya di tengah masyarakat, dari kedudukan tersebut terakumulasi pada status perempuan yang dalam budaya patriarki menempatkannya sebagai "mahluk manusia kedua" (Ahdiyah, 2013). Selama ini ada kesan bahwa kelompok yang terbentuk tidak menempatkan nilai inklusi terkhusus pada persoalan gender, untuk itu kelompok yang ada di desa target melalui program ini diberlakukan kewajiban melibatkan perempuan dalam setiap kelompok. Jumlah Perempuan dalam setiap kelompok yang terbentuk berkisar antara 3-5 perempuan. Hal ini dimaksudkan selain sebagai bentuk inklusifitas gender juga dimaksudkan untuk penguatan peran serta perempuan dalam semangat keberdayaan masyarakat

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan program kemandirian masyarakat dalam pemulihan kerusakan lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari melakukan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi dengan melakukan pendekatan secara partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemberdayaan. Berdasarkan Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi pada lima desa pendampingan ditemukan masalah banjir, kurangnya ketersediaan pupuk sulitnya mendapatkan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Dari hasil identifikasi masalah terbentuklah rumusan Rencana Kerja Masyarakat seperti budidaya ikan air tawar, penanaman tanaman jangka panjang, penanaman hortikultura, dan usaha ternak. Rencana kerja yang diusulkan harapannya dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan dapat menjawab masalah yang terjadi di desa masing-masing.

## 5. PERSANTUNAN

Terima kasih kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pendampingan dan kepercayaannya kepada Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat dalam melakukan Pendampingan Program Kemandirian Masyarakat dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut untuk mewujudkan tujuan bersama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

## REFERENSI

- Adenansi, D., Zainuddin, M., & Rusyidi, B. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 347–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13582>
- Idrus, A.A., Ilhamdi, L., Mertha, I. G., Abidin, L. A. M., & Yaqutunnafis, L. (2021). Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3), 328–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.996>
- Ahdiah, O. I. (2013). *Peran-peran perempuan dalam masyarakat*. 05(02), 1085–1092.
- Amelia, M. E. A., Sumampow, I., & Rachman, I. (2022). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sangehi studi kasus di Kecamatan Tahuna Timur. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.
- Aryanisila. (2023). The Role Of Village-To-Village Collaboration In Protecting, Managing And Preserving The Results Of The Implementation Of National Capacity Building Programs For Community Self-Reliance Banyuasin District. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 75–90.
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. *Moderat*, 6(1), 135–143.
- Hairunisyah, N., Anggreini, D., Sri, M. A., & W.H. (2020). Pemberdayaan Di Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 26(4), 241–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i4.20646>
- Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (S. Hani (Ed.)). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Indrizal, E. (2014). Diskusi Kelompok Terarah Focus Group Discussion (Fgd) (Prinsip-Prinsip Dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 75–82. <https://doi.org/https://DOI10.25077/jantro.v16i1.12>
- Jamasy, O., Gunawan, H., Askary, M., & Suwendar, A. (2023). Collaboration of Stakeholders as a Model for the Protection and Sustainable Management of Peatland Ecosystems. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(2), 624–634.
- Malik, A., Arbarini, M., Yusuf, A., Ilyas, & Mu'arifuddin. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pelatihan Social Media Officer menuju Desa Mandiri di Desa Kalongan Kabupaten Semarang. *JURNAL IMPLEMENTASI*, 1(2), 214–219.
- Azis, M.V.N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VII(01).
- Prihtanti, T. M., Widyawati, N., & Pudjihartati, E. (2024). Peningkatan Kepedulian Lingkungan melalui Kegiatan Pilah dan Olah Sampah pada Kelompok PKK di Kota Salatiga. *Warta LPM*, 27(1), 41–49. <https://doi.org/10.23917/warta.v27i1.3037>
- Putera, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Demokrasi*, VI(1), 1–25.
- Simandjuntak, R., & Mantiri, J. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pentingnya Lahan Pertanian Pangan (Dari Perspektif UU No 41 Tahun 2009). *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 1639–1646.
- Sururi, A., Hasanah, B., Ma'lumatyah, M., & Dwianti, A. (2022). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kapasitas Aktor Perguruan Tinggi Di Kota Serang. *Jurnal Litbang Sukowati*, 6(1), 109–122. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.330>
- Syukri, M., & Mahmut, C. (2019). Analisis Dimensi Mata Pencaharian Dan Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Pe. *Jemma | Jurnal Of Economic, Management And Accounting*, 2(4), 89–101.
- Utami, R. A., & Novikarumsari, N. D. (2022). Community Empowerment of Lego Coffee Farmers for Sustainable Agrotourism in the Perspective of the Pentahelix Model in Gombongsari, Banyuwangi Regency. *Journal of Communication and Agricultural Extension*, 3(1), 61–74.
- Wijayanto, V., Suwartapradja, O. S., & Hermawati, R. (2017). Perubahan Mata Pencaharian dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 2(2), 66–77.